BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelaksanaan pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala yang dilakukan baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara dan membantu realisasi rencana pembangunan nasional. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimanya diperoleh dari pajak. Penerimaan pajak ini berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, meskipun masyarakat sering kali tidak merasakan kemanfaatan tersebut secara langsung. Diketahui bahwa penerimaan pajak negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hasil dari pajak tersebut belum banyak dirasakan oleh sebagian masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut akan menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga berujung pada keengganan masyarakat untuk membayar pajak dan lebih parahnya terjadinya penggelapan pajak (Palulungan, 2015).

Penggelapan pajak merupakan usaha atau cara yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang perpajakan (Ardian & Pratomo, 2015). Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya peraturan

yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang berlaku dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan bahwa mereka memiliki etika yang buruk (Magfiroh & Fajarwati, 2016). Salah satu kasus yang menarik perhatian masyarakat adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan yang merupakan petugas pajak. Gayus Halomoan Tambunan adalah bekas PNS di Direktorat Jendral Pajak Kemkeu. Ia dipenjara karena melakukan penyalahgunaan wewenang, menerima suap dari wajib pajak. Gayus merupakan PNS golongan IIIA namun dirinya disebut memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah.

Gayus dinyatakan terbukti bersalah dengan menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, yang merupakan konsultan PT Metropolitan Retailmart terkait kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 570 juta. Gayus juga terlibat dalam kasus oenggelapan pajak PT Megah Citra Raya . gayus terbukti bersalah karena menerima gratifikasi saat menjabat sebagai petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen Pajak. Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US\$ 659.800 dan Sin\$ 9,6 juta. Gayus juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa uang Rp 925 juta, US\$ 3,5 juta, US\$659.800, Sin\$ 9,6 juta dan 31 keping logam (cnnindonesia.com).

Berdasarkan contoh kasus yang ada, penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan tinggi, dimana mereka yang seharusnya bisa di contoh bagi masyarakat awam untuk pembayaran pajak tetapi mereka yang melakukan pelanggaran atas penggelapan pajak. Dengan adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di pikiran wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Persepsi merupakan proses di mana seseorang menentukan, berupaya dan menerjemahkan stimulasi ke dalam suatu uraian yang harmonis dan penuh makna

(Lubis, 2011:97). Menurut Gibson (2010) persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian dipahami dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu dan faktor lingkungan, sehingga akan menghasilkan perilaku yang berbeda pula. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Reformasi perpajakan di Indonesia yang dimulai dari tahun 1984, memperkenalkan *self assessment system* yaitu setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga aparat pajak hanya mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan yang tinggi. Keberhasilan *self assessment system* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak. Faktor utama penentu keberhasilan ini adalah terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et, al., (2019) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian ini tidak sejalan oleh Tumewu dan Wahyuni (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Salah satu asas perpajakan yang paling penting adalah keadilan. Sistem perpajakan yang adil merupakan *reward* bagi wajib pajak, karena mempunyai kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Mengingat pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional, Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintahan unit dalam organisasi Departemen Keuangan

yang ditugasi menangani masalah pajak telah berusaha untuk mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya melalui pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan program tersebut diupayakan dapat berjalan secara terintegrasi, yaitu dapat berjalan lancar dan berkesinambungan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatulla dan Arisman (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi keadilan terhadap penggelapan pajak, sedangkan penelitian ini tidak sejalan oleh Pramita dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi keadilan terhadap penggelapan pajak.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dari kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Ketika diskriminasi dilakukan oleh aparat pajak, maka akan muncul pola pikir yang buruk terhadap aparat pajak sehingga wajib pajak tergerak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap hal tersebut etis untuk dilakukan (Widjaja et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Permadi (2017) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi diskriminasi terhadap penggelapan pajak, Sedangkan penelitian ini tidak sejalan oleh Widiawati dan Nurdiwaty (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi keadilan terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan uraian latar belakang, dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini ini guna mendapatkan keyakinan yang mendalam mengenai keterkaitan sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak. Adapun perbedaan penelitian saat ini penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia khususnya yang sudah mengambil mata kuliah

malam. Sedangkan penelitian terdahulu mengambil sampel mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Reguler Brevet.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Etika dari sudut pandang Mahasiswa STEI Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Reguler Malam Tahun 2018 & 2019 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah persepsi etika sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah persepsi etika keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
3. Apakah persepsi etika diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi etika sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak ?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi etika keadilan terhadap penggelapan pajak ?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh persepsi etika diskriminasi terhadap penggelapan pajak ?